

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA
DAERAH, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah/ Kota Se-Jawa
Tengah Tahun 2013-2016)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Evy Andriyani
NIM 14.0102.0028**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA
DAERAH, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah/ Kota Se-Jawa
Tengah Tahun 2013-2016)**

SKRIPSI



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang**

**Disusun Oleh:
Evy Andriyani
NIM 14.0102.0028**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH,
DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah/ Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2013-2016)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Evy Andriyani

NPM 14.0102.0028

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **16 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Ketua

Faridh, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

Annisa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.

Anggota

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

10 SEP 2018

Dra. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evy Andriyani

NPM : 14.0102.0028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA

DAERAH, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah/ Kota Se-Jawa Tengah

Tahun 2013-2016)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 30 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Evy Andriyani
NIM. 14.0102.0028

RIWAYAT HIDUP

Nama : Evy Andriyani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 4 Januari 1988
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat Rumah : Griya Manding Asri Blok D No 5 RT 06
RW 01 Kel. Manding, Kec. Temanggung,
Kab. Temanggung
Alamat Email : evyandriyani88@gmail.com
Pendidikan Formal:
Sekolah Dasar (1994-2000) : SD Negeri Temanggung 1 Nomor 2
SMP (2000-2003) : SMP Negeri 1 Temanggung
SMK(2003-2007) : SMK Negeri 1 Temanggung
Perguruan Tinggi (2014 – 2018) : S1 Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhamadiyah Magelang

Magelang, 30 Agustus 2018
Pembuat Pernyataan,



Evy Andriyani
NIM. 14.0102.0028

MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah diri mereka sendiri.*

(Q.S. Ar Ra'du : 11)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al Insyirah : 6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah/ Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2013-2016).”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

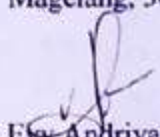
Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, pembimbing dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., MSc. selaku dosen pembimbing sekaligus selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah magelang yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memeberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Farida, S.E., MSc, Ak, CA. selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya
3. Ibu Annisa Hakim Purwantini, S.E., MSc. selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.

4. Dosen Laboratorium Bahasa, Pimpinan dan staf Universitas Muhammadiyah Magelang untuk bimbingan dan pelayanan yang diberikan.
5. Orang tua, Suami dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
6. Para sahabat yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Magelang, 30 Agustus 2018


Evy Andriyani
NIM. 14.0102.0028

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN RIWAYAT HIDUP | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 9 |
| E. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS . | 11 |
| A. Telaah Teori | 11 |
| 1. Teori Keagenan | 11 |
| 2. Kekayaan Daerah | 12 |
| 3. Dana Perimbangan | 14 |
| 4. Belanja Daerah | 16 |
| 5. Ukuran Pemerintah Daerah | 17 |
| 6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 19 |
| B. Telaah Penelitian Terdahulu | 19 |
| C. Perumusan Hipotesis | 20 |
| D. Model Peneltian | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Populasi dan Sampel..... | 26 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| B. Data Penelitian..... | 27 |
| 1. Jenis dan Sumber Data..... | 27 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| C. Variabel dan Pengukuran Variabel | 27 |
| D. Metode Analisis Data | 27 |
| 1. Analisis Statistik Diskriptif | 28 |
| 2. Uji Asumsi Klasik | 29 |
| 3. Analisis Regresi Berganda | 31 |
| E. Pengujian Hipotesis | 32 |
| 1. Koefisien Determinasi | 32 |
| 2. Uji F (<i>Goodness of Fit Test</i>) | 33 |
| 3. Uji Statistik t | 33 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Sampel Penelitian | 35 |
| B. Statistik Deskriptif | 35 |
| 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah..... | 36 |
| 2. Kekayaan Daerah | 37 |
| 3. Dana Perimbangan | 37 |
| 4. Belanja Daerah | 38 |
| 5. Ukuran Pemerintah Daerah | 38 |
| C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik | 39 |
| 1. Uji Normalitas | 39 |
| 2. Uji Autokorelasi | 39 |
| 3. Uji Multikolinieritas | 40 |
| 4. Uji Heteroskedastisitas | 41 |
| D. Analisis Regresi Linier Berganda | 42 |
| E. Uji Hipotesis | 42 |
| 1. Koefisien Determinasi | 43 |
| 2. Uji F | 44 |
| 3. Uji Nilai t | 45 |
| F. Pembahasan | 48 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 48 |
| 2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 49 |
| 3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 51 |
| 4. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 53 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 56 |
| C. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN | 59 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Penerlitian Terdahulu | 19 |
| Tabel 3.1 | Definisi dan Pengukuran | 27 |
| Tabel 4.1 | Ringkasan Pemilihan Sampel | 35 |
| Tabel 4.2 | Statistik Diskriptif | 36 |
| Tabel 4.3 | Uji Normalitas | 39 |
| Tabel 4.4 | Uji Autokorelasi | 40 |
| Tabel 4.5 | Uji Multikoleniarisme | 41 |
| Tabel 4.6 | Uji Heteroskedastisitas | 41 |
| Tabel 4.7 | Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengobatan dengan Uji Glejser | 42 |
| Tabel 4.8 | Hasil Perhitungan Regresi Berganda | 42 |
| Tabel 4.9 | Hasil Uji R | 43 |
| Tabel 4.10 | Hasil Uji F | 44 |
| Tabel 4.11 | Keputusan Hipotesis | 45 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2013-2016 | 4 |
| Gambar 2.1 | Model Penelitian | 25 |
| Gambar 3.1 | Penerimaan Uji F | 33 |
| Gambar 3.2 | Penerimaan Uji t Positif | 34 |
| Gambar 3.3 | Penerimaan Uji t Negatif | 34 |
| Gambar 4.1 | Hasil Uji F | 45 |
| Gambar 4.2 | Uji t Variabel Kekayaan Daerah | 46 |
| Gambar 4.3 | Uji t Variabel Dana Perimbangan | 46 |
| Gambar 4.4 | Uji t Variabel Belanja Daerah | 47 |
| Gambar 4.5 | Uji t Variabel Ukuran Pemerintah | 47 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 | Daftar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah | 59 |
| Lampiran 2 | Daftar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sampel Penelitian | 60 |
| Lampiran 3 | Data-data Variabel Penelitian | 61 |
| Lampiran 4 | Uji Asumsi Klasik | 72 |
| Lampiran 5 | Uji Statistik Deskriptif | 74 |
| Lampiran 6 | Koefisien Regresi | 75 |
| Lampiran 7 | Tabel F | 76 |
| Lampiran 8 | Tabel t | 77 |
| Lampiran 9 | Tabel Durbin-Waston | 78 |

ABSTRAK

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah/ Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2013-2016)**

**Oleh :
Evy Andriyani**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan ukuran pemerintahan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan populasi yaitu LKPD kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel penelitian 35 LKPD. Untuk metode analisis data dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Sedangkan untuk olah data dengan menggunakan program IBM SPSS 23.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: (1) Kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (2) Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan (4) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah, ukuran pemerintahan daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur negara mempunyai berbagai macam tugas, yaitu salah satunya adalah tahap setelah pemerintah daerah melakukan kewajibannya yang dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan. Menurut (Mardiasmo 2009) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai: evaluasi bagaimana program tersebut berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan, dan alat komunikasi dengan publik.

Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Akan tetapi reformasi keuangan negara yang dimulai pada tahun 2003 telah memberikan mandat yang lebih besar kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal tersebut menjadi pendorong bagi BPK untuk berkontribusi dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Oesman Sapta Odang pada rapat paripurna DPD di Gedung Nusantara V DPR, Jakarta, Rabu (4/10).

IHPS I tahun 2017 merupakan ikhtisar dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 113 LHP pada pemerintah pusat, 537 LHP pada pemerintah daerah, serta 37 LHP BUMN dan badan lainnya. Pada semester I tahun 2017, BPK menerbitkan 537 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 (99%) dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2016. Terdapat 5 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Terhadap 537 LKPD Tahun 2016 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 375 LKPD (70%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 LKPD (26%), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 LKPD (4%).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah atau program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 12 persen dari 58% pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2016. Kenaikan opini WTP ini

menunjukkan adanya kenaikan kualitas LKPD yang didukung oleh upaya-upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan kondisi makro ekonomi suatu daerah dan lain-lain.

Laporan Keuangan Jateng tiga tahun berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini bermakna, laporan keuangan Pemprov Jateng transparan, dan bebas dari salah saji material. BPK dapat mengakses dan menguji seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ini bukti komitmen Provinsi Jawa Tengah mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan pemerintah berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sudah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir. Implementasi laporan keuangan berbasis akrual

dapat menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah yang lebih komprehensif meliputi seluruh hak dan kewajiban, kekayaan dan perubahan kekayaan, hasil operasi, realisasi anggaran dan sisa anggaran. Pada tahun anggaran 2015 jumlah LKPD yang mencapai opini WTP adalah 313 daerah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 378 daerah pada tahun anggaran 2016. Dengan perkembangan tersebut, pelaksanaan APBD semakin transparan, akuntabel dan memberikan manfaat lebih bagi pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah (Humas Jateng 2017).

Merujuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Jawa Tengah 2017, Pendapatan Daerah Jateng mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada 2016, realisasi Pendapatan Daerah naik sebesar Rp2.804 triliun dibanding tahun sebelumnya. Inflasi tahunan Jateng lebih rendah daripada inflasi nasional. Pada 2014, inflasi Jateng berada pada 8,22 persen, turun drastis menjadi 2,73 persen di tahun 2015, dan kembali menurun menjadi 2,36 persen pada 2016. Berikut Kinerja 35 kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah dalam bentuk grafik sebagai berikut



Sumber: data ubdit Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD 2017

Gambar 1.1
Kinerja Keuangan Kab/ Kota se-Jawa Tengah Th 2013-2016

Berdasarkan performa dari gambar 1 dapat dilihat fluktuasi kinerja selama 4 tahun dari 35 kota/ kabupaten se-Jawa Tengah. Dalam kurun 4 tahun kinerja pemprov. Jateng bervariasi antara 0.8 sampai dengan 1.15. Kinerja dibawah 1.0 menunjukkan performa yang baik karena pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Sedangkan kinerja diatas 1.0 menunjukkan kinerja yang kurang baik karena pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Berdasarkan performa gambar 1 juga terlihat fluktuasi yang sangat signifikan yaitu 1.55 di tahun 2013 kinerja salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sangat buruk. Kinerja keuangan 0.19 pada tahun 2016 terdapat salah satu kabupaten dengan kinerja yang sangat baik. Akan tetapi rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa tengah dalam kurun 4 tahun yaitu baik dikisaran 0.97, dan pada tahun 2016 rata-rata kinerja melebihi angka 1 yaitu 1.01 yang mengindikasikan kinerja pemerintah daerah buruk.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian Armaja dkk (2015), tentang pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh belanja daerah, dan tidak dipengaruhi oleh kekayaan daerah dan dana perimbangan. Penelitian lain yang terkait yaitu penelitian Rochmah (2015), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi dan *lverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh, belanja modal, dan ukuran

legislatif negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Aziz (2016), tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Jawa Timur. Dana perimbangan juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa timur.

Masdiantini and Erawati (2016) melakukan penelitian terkait tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, dana perimbangan, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan, hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif. Opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan. Dana perimbangan, kemakmuran, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Aziz (2016) dengan persamaan menggunakan semua variabel yang ada dan teknik analisis yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu: **Pertama**, menambah variabel Kekayaan Daerah, karena kekayaan yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda (Armaja dkk , 2015). Daerah yang memiliki kekayaan yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan

sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik.

Penambahan variabel didukung pada penelitian lain bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan dan parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah, karena kekayaan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan Puspasari (2016). Pada penelitian Pratama (2015) menunjukkan bahwa nilai kekayaan daerah sangat menentukan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah merupakan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar PAD pemerintah daerah maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya juga semakin tinggi, tujuannya adalah agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat juga tahu bagaimana kekayaan daerah tersebut dikelola oleh pemda.

Kedua, Objek penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah/ Kota Se-Jawa Tengah karena terdapat variasi penerimaan dan pengeluaran yang fluktuasi pada pemerintahan kota dan kabupaten se-Jawa Tengah. Selain itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan untuk penerimaan dan pengeluaran untuk beberapa pemerintah daerah Jawa Tengah pada kurun waktu 4 tahun.

Ketiga, Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu berkisar 4 tahun dari 2013 sampai dengan 2016. Tahun 2013 dipilih karena

penelitian mengacu pada data terbaru yaitu 5 tahun terakhir saat penelitian di buat. Untuk tahun 2016 karena pada saat tahun ini data sudah lengkap tersedia di alamat website resmi pemerintah, sedangkan untuk tahun 2016 ke atas belum semua tersedia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kekayaan Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan atas teori-teori yang telah ada.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi instansi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan sehingga mampu secara efektif meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi peneliti sendiri diharapkan mengkaji lebih dalam tentang hal yang berkaitan dengan kekayaan daerah (Pendapatan Asli daerah-PAD), dana perimbangan (*intergovernmental revenue*), belanja daerah (APBD), dan ukuran pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka penulisan skripsi ini disistematisasikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan analisis data dan pembahasan, yang berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan analisis data sebagai interpretasi hasil analisis, dan terakhir pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri atas kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Keagenan

Konsep dari teori agensi adalah dimana menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling 1976). Pandangan *agency theory* adalah menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi variabel keuangan yang dilaporkan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan yaitu:

- a. Masalah keagenan yang muncul pada saat keinginan atau tujuan dari *principle* dan *agent* berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi *principal* untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent*.
- b. Masalah pembagian risiko yang muncul pada saat *principle* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda pendapat.

Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/ melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh

prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Penelitian Ayuningsih (2016) menyatakan bahwa hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kesepakatan yang ditetapkan oleh masyarakat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan masyarakat.

2. Kekayaan Daerah

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap negara memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah (Setyaningrum, 2012). Sumber kekayaan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Armaja dkk, 2015)

PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Tingkat kekayaan daerah ini diprosikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibandingkan dengan total pendapatan (Armaja dkk, 2015)

Dengan diberlakukannya desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2012), Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a. Pajak daerah, berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- b. Retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda.

3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah (Pemerintah 2010)

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata

nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

4. Belanja Daerah

Pada PSAP No.2 Paragraf 7, mengatur bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Armaja dkk, 2015)

Menurut Pasal 1 Angka 27 PP No.58/2005, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”.

Menurut Bastian (2006), secara umum prosedur belanja daerah bertujuan untuk: memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan pendekatan informasi mengenai belanja, mulai dari pengakuan sampai proses pencatatan, dan memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada sehingga pemda dapat menghitung tingkat pengeluaran yang memungkinkan karena disesuaikan dengan tingkat dana

yang tersedia.

Menurut Halim (2012), klasifikasi belanja daerah yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran adalah:

- a. Belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan);
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringanbelanja aset tetap lainnya);
 - 1) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan beruang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah;
 - 2) Belanja transfer yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

5. Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut (Hartono dkk, 2014) Ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah

Daerah. Ukuran daerah mengacu pada seberapa besar organisasi. Pemerintah daerah dengan ukuran besar sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Harapan serta tuntutan terhadap pemerintah daerah akan memacu kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Ukuran entitas atau organisasi dalam hal pemerintah daerah dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk jumlah karyawan (ukuran modal manusia), jumlah aset (ukuran sumber daya fiskal), ukuran kapasitas, dan tingkat produksi (ukuran volume)

Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perolehan PAD digunakan untuk kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Ayuningsih , 2016).

Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006) Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. "Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah". Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan (Ayuningsih, 2016).

B. Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Variabel penelitian | Hasil |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Armaja dkk (2015) | Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Terhadap Kinerja Keuanga di Aceh | Variabel Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel kekayaan dan dana perimbangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. |
| 2. | Rochmah (2015) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran legislatif berpengaruh negatif dan tidak signifikan. |

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Lanjutan

| No | Nama Peneliti | Variabel penelitian | Hasil |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Aziz (2016) | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Jawa Timur | Variabel ukuran pemerintah, Intergovernmental revenue, dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung oleh data penelitian. |
| 4. | Retnowaty (2016) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat kekayaan daerah, leverage, dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah |
| 5. | Masdiantini and Erawati (2016) | Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan | Ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan, sedangkan Intergovernmental revenue, kemakmuran, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah. |

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2017

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan.

Kekayaan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu daerah dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap daerah memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan

berbeda. Kekayaan daerah disebut juga dengan Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik.

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah (Agen) telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga memiliki tingkat kemakmuran masyarakat (prinsipal) yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah. Walaupun tingginya kekayaan daerah tidak selalu menunjukkan keselarasan kinerja keuangan pemerintah.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda akan tetapi penelitian Rochmah (2015) diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja keuangan pemerintah daerah atau menerima. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk penelitian ini dapat diturunkan hipotesis:

H1. Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan.

Dana perimbangan adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah,

(Nam, 2001). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Pada praktiknya di pemerintah daerah (*Agent*) masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut Dana Perimbangan dari pemerintah pusat (*principal*). Hal ini sering dijumpai bahwa DAPER masih jauh lebih besar dari PAD. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar dana perimbangan yang diterima daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Penelitian Armaja dkk (2015) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Didukung penelitian Rochmah (2015) Hasil penelitian variabel Dana Perimbangan (DAPER) mempunyai berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk penelitian ini dapat diturunkan hipotesis :

H2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan.

PSAP No.2 Paragraf 7, mengatur bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sebagai contoh belanja untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (*principal*) dalam upaya memenuhi kewajiban daerah (*Agent*) yang mewujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (pasal 31 Permendagri No.13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Semakin besar belanja mengindikasikan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pada Penelitian Armaja dkk (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Didukung penelitian (Retnowaty 2016) variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk penelitian ini dapat diturunkan hipotesis:

H3. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

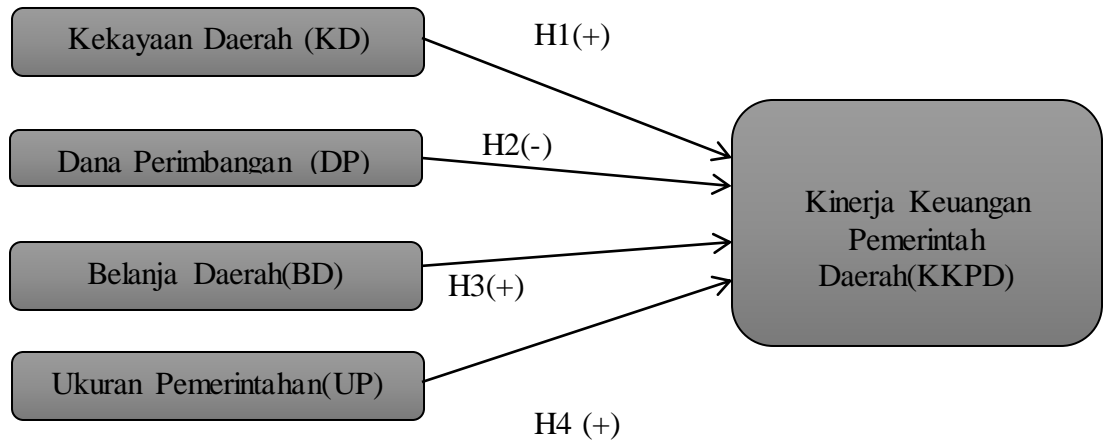
4. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan.

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas Damanpour (1991) dalam (Puspasri, 2016). Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah (Agen).

Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat (prinsipal). Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

Penelitian Aziz (2016) dengan hasil variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap variabel dependen (kinerja keuangan). Didukung penelitian (Retnowaty, 2016) ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk penelitian ini dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

D. Model penelitian

Gambar 2.1
Model penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan sampel

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2011) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dapat berdasarkan pertimbangan tertentu atau jatah tertentu (Jogiyanto 2011). Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini:

1. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Jawa Tengah 2016 dari situs resmi melalui www.djpk.kemenkeu.go.id
2. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK RI.
3. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencantumkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

B. Data Penelitian

1. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2016 yang diperoleh dari situs resmi Provinsi Jawa Tengah Melalui www.djpk.kemenkeu.go.id . Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain (yaitu pemerintah) sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan secara langsung melalui dokumen yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

C. Variabel dan Pengukuran variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran

| Variabel | Definisi Operasional | Pengukuran |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kekayaan Daerah | Kemampuan suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan, UU No.33 Tahun 2004 | <i>Kekayaan Daerah</i> = Jumlah Pendapatan Asli Daerah |
| Dana Perimbangan | Sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah, Nam (2001). | <i>Dana Perimbangan</i> = Total dana perimbangan/ Total pendapatan |

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran
Lanjutan

| Variabel | Definisi Operasional | Pengukuran |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Belanja Daerah | Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, PSAP No.2 Paragraf 7 | <i>Belanja Daerah</i> = Total Realisasi Belanja |
| Ukuran Pemerintah Daerah | Salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah, Damanpour (1991) dalam Puspasri (2016) | <i>Ukuran Pemerintah Daerah</i> = Total aset |
| Kinerja Keuangan pemerintah Daerah | Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, Bastian (2006) | <i>Kinerja</i> = Realisasi pengeluaran/ Realisasi penerimaan |

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2017

D. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Termasuk dalam teknik analisis data deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2011) Penggunaan Statistik Parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dulu akan dilakukan pengujian normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali 2011:160).

Untuk menguji data yang berdistribusi normal digunakan alat uji normalitas, yaitu *Kolmogorov-Sminov* Test. Adapun dasar pengambilan keputusan uji statistik *Kolmogorov-Sminov* Test menurut (Ghozali 2011:161) yaitu:

- 1) Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* $> 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini berarti data berdistribusi normal

b. Uji Autokorelasi

Maksud dari dilakukan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali 2011:110).

Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model terdapat autokorelasi atau tidak, pada penelitian ini menggunakan alat uji Durbin Waston (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi korelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan $+2$
atau $-2 < DW < +2$

c. Uji Heteroskedastisitas

Adapun tujuan dari pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali 2011: 139).

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan uji *Glejser*. Metode uji *Glejser* meregresikan nilai absolute residual dengan variabel bebas. Kriteria yang digunakan menurut (Ghozali 2011:142) adalah apabila nilai $p\text{-value} < 0,05$, maka model tersebut terdapat

heteroskedastisitas. Namun jika $p\text{-value} > 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal (variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali 2011)

Untuk mengukur multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai $\textit{tolerance} \leq 0,1$ dan $\textit{VIF} \geq 10$, mengartikan bahwa data tersebut terjadi multikolinieritas. Jika nilai $\textit{tolerance} \geq 0,1$ dan $\textit{VIF} \leq 10$, dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas dalam data penelitian tersebut (Ghozali 2011:106).

3. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan analisis regresi yaitu mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013). Penelitian ini untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut:

$$KK = \beta_1 KD + \beta_2 DP + \beta_3 BD + \beta_4 UP + e$$

Keterangan :

KK = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

KD = Kekayaan Daerah

DP = Dana Perimbangan

BD = Belanja Daerah

UP = Ukuran pemerintah

β_1, \dots, β_4 = Koefisien Regresi

e = Error / Variabel Gangguan

E. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

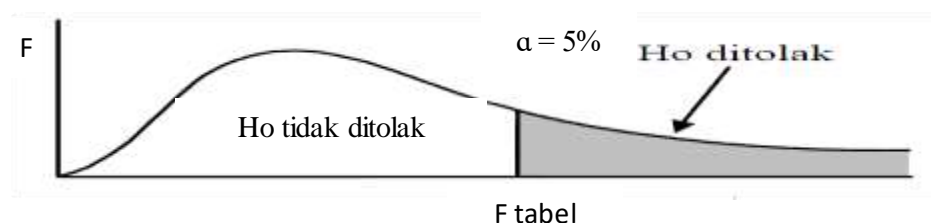
Koefisien determinan merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinan dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen berupa Kekayaan daerah, Dana perimbangan, Belanja daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah serta variabel dependen berupa kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan *Adjusted R2* berkisar antara 0 dan 1. Nilai *Adjusted R2* yang semakin mendekati 1 maka kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik. Sebaliknya, bila nilai *Adjusted R2* menjauh dari 1 maka kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen kurang baik (Ghozali 2011:190).

2. Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Ghozali (2013), uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, $P_{value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, $P_{value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (tidak *fit*).



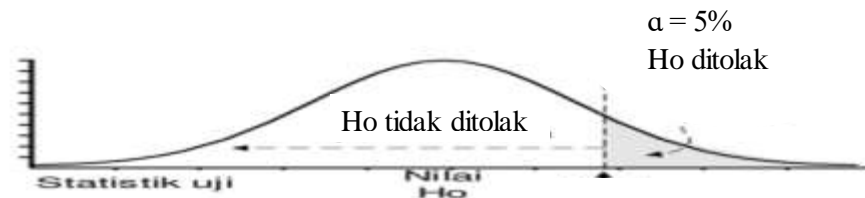
Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3. Uji Statistik t

Uji t digunakan mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat

signifikansi yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria penerimaan positif :

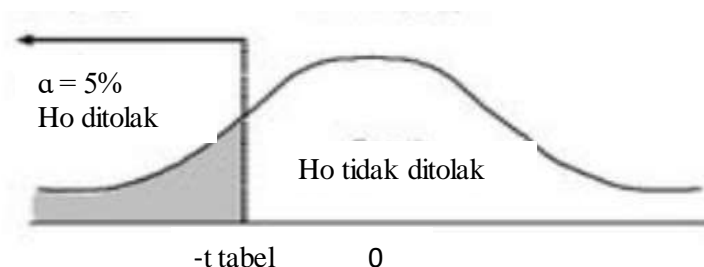
- Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} < \alpha=0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} > \alpha=0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t positif

Kriteria penerimaan negatif:

- Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap dependen
- Jika $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen



Gambar 3.3
Penerimaan Uji t negatif

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota dalam 1 Provinsi.

Hasil *Adjusted R²* menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah mampu menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 32,6 %, sedangkan sisanya 67,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. Hasil Uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya, kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah secara baik dan model yang digunakan dalam model ini sudah *fit*.

Hasil uji t menunjukkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kekayaan daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel dependen yaitu kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah yang hanya mampu menjelaskan 32,6% faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.
2. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Rentang waktu yang digunakan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2013-2016 sehingga belum dapat digeneralisasi.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain seperti rasio keuangan seperti rasio efektivitas, karena semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah (Rahmayati, 2016).
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti Provinsi lain agar dapat memperbandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian agar lebih mampu dilakukan generalisasi atas data penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaja, Ridwan Ibrahim, and Aliamin. 2015. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh)." *PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 3(September):168–81.
- Ayuningsih, Diah. 2016. "Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah." 1–123.
- Aziz, Asmaul. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)." *EKSIS XI*(1):86–101.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hartono, R, A. Mahmud dan N.S. Utaminingsih. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok; 1-13.
- Humas Jateng. 2017. "Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jateng Raih WTP Ketujuh." *Ul, Diskominfo Jateng*. Retrieved Mei 28, 2017 (<https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-raih-wtp-ketujuh/>).
- Jensen, M. C dan Meckling, W. H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*.
- Jogiyanto. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Juwita, Rahmini. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah" (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2012 - 2015). SEMNAS FEKON 2016

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masdiantini, Putu Riesty and Ni Made Adi Erawati. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan." *Akuntansi Universitas Udayana* 1150–82.
- Marfiana, N dan Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *Jurnal. Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Pemerintah, Indonesia. 2010. *Standart AKuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Indonesia: Lampiran I.01.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rahmayati, Anim. 2016. " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013". *Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1 Maret 2016*. ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689.
- Retnowaty, Renny. 2016. "Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Naskah Publikasi* 1–14.
- Rochmah, Siti Nur. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)." *Naskah Publikasi* 1–17.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 8th ed. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi* . Bandung: Refika Aditama, ISBN 978-602-8650-0-68
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.